

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi berperan pada segi pengelolaan keuangan suatu entitas semakin disadari oleh banyak pihak, baik entitas yang berorientasi laba ataupun non laba. Peran akuntansi paling dasar tentu saja adalah kemampuannya menyajikan berbagai informasi serta jawaban yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan keuangan. Pada dasarnya, entitas nonlaba berbeda dengan entitas bisnis. Walaupun entitas nonlaba tidak bertujuan laba, namun masih bersinggungan dengan persoalan keuangan karena entitas nonlaba mempunyai anggaran, membayar karyawan, membayar rekening listrik serta telepon, dan urusan keuangan lain-lain. Selain itu terdapat karakteristik khusus entitas nonlaba dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Entitas nonlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (PSAK45, 2015).

Kekhususan ini memiliki karakteristik yang menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya (IAI, 2018). Entitas nonlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya. Terkait dengan konsep akuntabilitas dimana akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas maka laporan keuangan perlu disajikan oleh

entitas nonlanba. Alasannya karena dengan laporan keuangan maka dapat menilai pertanggungjawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya (Wardayati & Sayekti, 2021).

Entitas nonlaba adalah sebuah entitas yang berjalan dalam pelayanan masyarakat yang tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan laba. entitas nonlaba didirikan oleh sekelompok masyarakat ataupun dikelola oleh pihak swasta. Sumber dana yang diperoleh biasanya berasal dari para donatur atau penyumbang lainnya (Purba et al., 2022).

Entitas nonlaba menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, maka pihak manajemen melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan tentunya harus sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK No 1). Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh organisasi yang berorientasi laba, entitas nonlaba juga memerlukan laporan keuangan guna mengetahui kegiatan organisasi dalam satu periode dan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan, penyaluran dana dan kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan. Entitas nonlaba dalam melaksanakan program-programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, maka dari pertanggungjawaban laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. Masing-masing entitas nonlaba memiliki karakteristik yang unik dan masih perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan standarisasi pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan juga

akan disesuaikan dengan karakteristik organisasi namun tetap pada prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Entitas nonlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Pendirian entitas nonlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh laba (profit). Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan atas kinerja keuangan yang baik yang disebut dengan surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Perolehan surplus ini diperlukan oleh entitas nonlaba yang berfungsi untuk memperbesar skala kegiatan pengabdianya dan memperbaharui sarana yang rusak (Rahayu et al.,2019).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas nonlaba dalam pengelolaan keuangan, biasanya para donatur mensyaratkan adanya laporan keuangan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dilingkungan yayasan. Laporan keuangan dibuat agar pengguna laporan keuangan mengetahui terkait posisi keuangan organisasi, kinerja keuangan dan arus kas suatu organisasi yang dapat bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan internal maupun eksternal untuk pengambilan kebijakan.

Laporan keuangan entitas nonlaba berbeda dengan laporan keuangan organisasi bisnis pada umumnya, salah satu perbedaan utamanya terletak pada bentuk laporan keuangan. Tetapi selama ini tidak banyak orang yang tahu bagaimana bentuk laporan keuangan entitas nonlaba seperti panti asuhan, masjid, sekolah ataupun organisasi nonprofit lainnya. Seringkali, muncul anggapan bahwa

yang namanya laporan keuangan di setiap organisasi, baik entitas laba maupun nonlaba intinya sama. Laporan keuangan entitas nonlaba yang berisi tentang dana atau sumbangan dari berbagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pihak internal dan pihak eksternal. Entitas nonlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan (Lubis & Ovami, 2019).

Entitas nonlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun mulai tahun 2019 tepatnya pada tanggal 11 april 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Dimana sebelumnya untuk organisasi nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka entitas nonlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 (IAPI, 2020).

PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, dimana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto, yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan (*with restrictions*) akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan (*without restrictions*), oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba (IAI:2018). Dengan keluarnya

peraturan baru ini maka entitas nonlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Tapi munculnya peraturan baru ini, terasa sulit untuk diterapkan oleh entitas nonlaba karena banyak entitas nonlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya (Diviana et al., 2020).

Panti asuhan sebagai salah satu entitas nonlaba merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah atau masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan, penyantunan dan pengentasan anak terlantar (Purba et al., 2022). Salah satu entitas nonlaba yang menjadi fokus penelitian ini adalah LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo, yang merupakan panti asuhan yang tertua di kabupaten Ponorogo yaitu didirikan pada 22 februari 1922 yang beralamatkan di Jl. KBP Duryat No. 29-31, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dari hasil Tanya jawab singkat dengan kepala LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo ini sudah menyajikan laporan keuangan, namun hanya melakukan pencatatan atau sistem pelaporan keuangannya secara sederhana yang mana mereka lakukan setiap periodenya, yaitu sebatas hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta perincian beban-beban.

Secara praktiknya LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo sudah melaksanakan pencatatan, akuntabilitas, dan transparansi dengan cara melakukan rapat rutin pengurus panti, mengupload semua kegiatan panti asuhan dimedia sosial dan memberikan laporan keuangan kepada para donator sebelum hari raya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo tergambar bahwa ada beberapa factor yang menyebabkan penyajian laporan

keuangan hanya berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang bersifat manual dalam bentuk file dokumen excel.

Laporan .ISAK 35 pada dasarnya dibuat dalam rangka menciptakan kesetaraan laporan keuangan dari tiap-tiap entitas nonlaba, karena dengan adanya kesetaraan maka akan memudahkan tiap-tiap entitas nonlaba dalam melakukan penyusunannya. Namun pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo belum memahami bagaimana konsep laporan keuangan yang seharusnya dapat lebih baik untuk dilakukan, yang mana menyebabkan ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan konsep ISAK 35. Maka sangat diperlukan pemahaman atas konsep laporan keuangan yang berlaku, yang sebagaimana dapat dijadikan panduan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada suatu entitas nirlaba. Sebagai informasi, sasaran utama laporan keuangan entitas nonlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nonlaba.

Dalam laporan keuangan LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo belum menerapkan penyusunan dan pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan format dan isi sesuai dengan ISAK 35. Dalam kegiatan operasional keuangan semua entitas baik itu berorientasi laba maupun nonlaba diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku yang mana digunakan untuk pelaporan setiap tahun. Penyajian laporan sesuai standar diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama para donatur yang memberikan sumber daya. Kepercayaan masyarakat umum diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan kemakmuran bagi panti asuhan itu sendiri. Adanya laporan yang

sesuai standar, donatur dapat mengetahui aktivitas keuangan secara detail sehingga mereka lebih tertarik lagi untuk menyumbangkan sumber daya untuk LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah.

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo dalam melakukan penyusunan laporan keuangan mereka, serta memberikan transparansi bagi publik atas sumbangan yang telah diberikan selama ini bagi panti asuhan.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil sebagai berikut, yang mana bias menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Purba et al (2022) menyatakan bahwa, Panti Asuhan Kasih Murni menggunakan laporan keuangan sederhana yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Organisasi menyajikan laporannya dengan tiga bentuk, yaitu laporan hasil kegiatan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Secara keseluruhan laporan keuangan organisasi tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Yulinartati dan Martiana (2022) menyatakan bahwa, sumber penerimaan dana Yayasan Panti Asuhan Darush Shibyan Jombang Jember diperoleh dari sumbangan dari masyarakat dan kaleng berkah yang dikumpulkan setiap hari sabtu oleh para donator. Sistem pengeluaran Yayasan Panti Asuhan Darush Shibyan Jombang Jember belum disusun secara rinci misalnya pengeluaran operasional umum. Bentuk laporan pada Yayasan Panti Asuhan Darush Shibyan belum sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu ISAK 35 karena pada laporan Yayasan hanya melakukan pemasukan dan pengeluaran, sehingga dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan saldo akhir.

Purba et al (2023) menyatakan bahwa, Panti Asuhan Terang Fajar dalam hal pertanggungjawaban laporan finansial hanya berupa selembat kertas atau dengan kata lain faktur yang berisikan pemasukan dan pengeluaran. Selain daripada itu donator yang membantu Panti Asuhan Terang Fajar juga tidak meminta secara detail mengenai laporan finansial, mereka hanya meminta dokumentasi berupa video dan foto sehingga Panti Asuhan Terang Fajar hingga saat ini belum memiliki laporan finansial yang seturut dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu ISAK 35.

Setiawati dan Hafni (2023) menyatakan bahwa laporan yang digunakan Panti Asuhan saat ini terbatas hanya penerimaan dan pengeluaran kas bulanan. Dikarenakan kurangnya pemahaman atau kompetensi sumber daya manusia (staf bagian administrasi keuangan) Panti dibidang akuntansi, mengakibatkan laporan keuangan Panti yang sesuai ISAK 35 belum dapat disajikan. Lasfita dan Muslimin (2020) menyatakan bahwa, Pengelolaan dan pencatatan keuangan Masjid AlMabrur Sukolilo Surabaya masih sederhana yang masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran Masjid. Kemudian, Masjid AlMabrur Sukolilo Surabaya masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35 karena dalam pembuatan laporan keuangan Masjid AlMabrur Sukolilo Surabaya diperoleh dari infaq jum'at, infaq idul fitri, infaq idul adha, infaq donator dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkenan dan tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) 35 TENTANG PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA PADA LKSA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH PONOROGO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo terhadap laporan keuangan?
2. Bagaimana penerapan pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui laporan keuangan pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo
- b. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berorientasi Nonlaba pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penyusunan dan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan (ISAK) 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi, wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya

c. Bagi Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo mengenai bagaimana penyusunan dan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo

